

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala bentuk aktivitas ekonomi yang menghasilkan integrasi pasar antara negara di seluruh dunia disebut "globalisasi ekonomi". Hal ini menyebabkan kesalahan yang sering terjadi baik dari pengirim maupun penerima. Oleh karena itu, manajemen harus memverifikasi asumsi mereka untuk memastikan bahwa pihak yang terkait tidak memiliki asimetri informasi. Akibatnya, laporan keuangan harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, untuk memastikan bahwa kualitas laporan keuangan yang perusahaan tersebut hasilkan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak.

Profesi akuntan publik salah satu profesi yang dipercaya oleh publik dapat memberikan rasa keyakinan dan kepercayaan bagi pemilik perusahaan, Arens (2015:168) menyatakan bahwa pelaksanaan audit sangat penting karena tujuannya untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Ini disebabkan fakta bahwa laporan keuangan bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal.

Dalam proses pengauditan diperlukan pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah dirancang serta apakah rancangan sudah diterapkan telah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini berhubungan dengan kualitas dari auditor yang dikontrak oleh suatu perusahaan, untuk menunjukan auditor yang berkualitas, maka *Fee* audit perlu diperhitungkan dari berbagai prosedur yang dilalui seperti dalam operasional aktivitas, pencarian bahan bukti audit dan lain-lain. *Fee* audit adalah imbalan dari penerima jasa kepada akuntan publik atas jasa audit yang dilakukan, penentuan *Fee* audit merupakan hal yang sangat krusial. (Agun et al., 2021). Keunikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas dengan lingkungan organisasi yang Hybrid atau memiliki banyak klaster industri yang

Lita Natalia, 2024

PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI HYBRID TERHADAP FEE AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berbeda-beda. BUMN di Indonesia dapat dikatakan sebagai organisasi *hybrid* karena harus memenuhi dua tujuan, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial (Jin, T. F., 2015). Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menerapkan tata kelola yang baik, beberapa BUMN di Indonesia diprivatisasi. Dalam tujuan ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor usaha strategis yang tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Keberadaan BUMN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi BUMN. Tujuan sosial BUMN dapat dicapai melalui program kemitraan usaha kecil dan menengah (UKM) dan program bina lingkungan, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil di sekitar lokasi BUMN.

Selain itu di Indonesia, terdapat BUMN yang berbentuk Persero dan Perum dengan karakteristiknya masing-masing, dimana organisasi ini tidak hanya berbentuk organisasi publik dan organisasi privat, tetapi juga organisasi campuran (*hybrid organization*) sebagai gabungan dari organisasi publik dan privat. Sehingga (Indrawati, Y., 2020). Sehingga BUMN harus mengelola keuangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai kabar berita saat ini banyaknya perusahaan BUMN yang tersandung kasus-kasus laporan keuangan, artinya banyak Kantor Akuntan Publik yang bereputasi tinggi tidak dapat mengungkapkan fraud atau kesalahan atau kurangnya kualitas pada laporan keuangan BUMN sehingga dapat dinilai bahwa besaran *Fee* audit yang tinggi dan yang diterima oleh KAP tersebut kurang profesional. Pada Juni 2019, ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia kesalahan pengakuan pendapatan sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Kemudian kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Dengan terbongkarnya

Lita Natalia, 2024

PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI HYBRID TERHADAP FEE AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kasus yang terjadi di maskapai Garuda, maka dinilai menjadi pintu masuk pengungkapan masalah-masalah yang terjadi di BUMN, seperti dugaan gagal bayar Asuransi Jiwasraya dan dugaan korupsi di Krakatau Steel, Waskita, serta Bank Tabungan Negara (BTN).

Selain itu dikarenakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki karakteristik yang dan sektor industri yang *Hybrid* atau berbeda-beda, tentunya basis utama Penentuan *Fee* Audit ini kesepakatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan sangat beragam, maka dapat dikatakan bahwa indikator utama yang dilakukan KAP adalah ke basis risiko, sementara indikator yang digunakan oleh perusahaan adalah basis kepada standar satuan belanja atau standar anggaran. Maka dapat dilihat bahwa proses atau penetapan *Fee* audit ini sangat beragam, selain itu berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dalam laporan keuangan perusahaan BUMN, besaran *Fee* audit minimum adalah Rp159.500.000 dikeluarkan oleh PT. Taspen tahun 2018 dan sedangkan besaran *Fee* audit maksimumnya sebesar Rp70.590.000.000 yang dikeluarkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Pada tahun 2021, sehingga didapatkan nilai rata-rata berbeda dan adanya kesenjangan besaran *Fee* audit ini dikarenakan pada BUMN ini terdapat beberapa jenis perusahaan yang beragam serta banyak faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *Fee* audit.

Pedoman pembayaran *Fee* audit sudah diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), IAPI mengeluarkan pedoman bagi seluruh anggota IAPI (akuntan publik) mengenai ketentuan besarnya *Fee* audit yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan *Fee* Audit Laporan Keuangan. Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *Fee* Audit laporan keuangan atau *Fee* audit per jam setiap proses audit yang akan dibebankan KAP kepada *auditee* berdasarkan klasifikasi berjenjang atau tingkatan staf yang dipekerjakan selama proses audit. Peraturan IAPI tersebut membolehkan KAP untuk menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu penetapan *Fee* audit juga dilakukan secara subjektif oleh perusahaan, tinggi atau rendahnya besarnya *Fee* audit dari jasa audit yang didapatkan perusahaan oleh auditor independen berkaitan

Lita Natalia, 2024

PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI HYBRID TERHADAP FEE AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

erat juga dengan kemampuan tawar-menawar yang dilakukan diantara klien dan auditor.

Besar kecilnya biaya audit ditentukan oleh tiga aspek, antara lain: 1) Aspek *auditee* / klien, 2) Aspek auditor, dan 3) atribut perjanjian (Pradana (2016) dan Hay (2010) dalam penelitian ini penulis akan menguji beberapa faktor *auditee*/ klien sebagai acuan pengujian pada perusahaan BUMN di Indonesia. Hal ini dikarenakan

1. Tingkat Risiko Klien:Klien dengan risiko yang lebih tinggi memerlukan lebih banyak waktu dan usaha dari auditor untuk mengidentifikasi, menguji, dan mengurangi risiko tersebut. Risiko ini dapat mencakup kompleksitas operasi, risiko finansial, kepatuhan terhadap regulasi, dan potensi adanya fraud (Pertiwi, 2019).
2. Kompleksitas dan Ukuran Klien : Klien yang lebih besar atau memiliki struktur operasi yang lebih kompleks membutuhkan lebih banyak pekerjaan audit (Pertiwi, 2019).
3. Waktu dan Sumber Daya yang Dibutuhkan: Fee audit sering kali didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan oleh tim audit. Jika klien memiliki sistem yang rumit atau jika banyak pengujian tambahan diperlukan karena faktor risiko tertentu, biaya akan meningkat sesuai dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan.
4. Reputasi dan Tanggung Jawab Profesional Auditor: Auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini yang dapat diandalkan atas laporan keuangan klien. Jika ada risiko tinggi yang tidak teridentifikasi atau jika ada kesalahan material, reputasi dan tanggung jawab hukum auditor dapat terpengaruh.
5. Asuransi dan Perlindungan Hukum : Auditor sering kali memerlukan asuransi profesional untuk melindungi mereka dari klaim dan tuntutan hukum terkait dengan pekerjaan audit. Klien yang berisiko lebih tinggi cenderung meningkatkan biaya asuransi ini.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, auditor perlu menentukan fee audit yang mencerminkan jumlah waktu, upaya, dan risiko yang terkait dengan audit klien tertentu. Penetapan fee yang didasarkan terutama pada risiko klien / *auditee*

Lita Natalia, 2024

PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI HYBRID TERHADAP FEE AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memastikan bahwa auditor memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit yang memadai dan dapat mempertahankan standar profesionalisme yang tinggi. Sedangkan aspek reputasi auditor dan perikatannya merupakan bukan hal yang utama karena Kantor Akuntan Publik tentunya harus memiliki independensi dan taat terhadap prosedur yang berlaku.

Pada Aspek Klien dapat diukur dengan indikator risiko yang sesuai dengan karakteristik atau lingkungan perusahaan (Sukrisno, 2014) Semakin tinggi risiko penugasan audit semakin tinggi pula upaya audit untuk memberikan opini audit yang sesuai disesuaikan dengan jumlah *Fee* audit yang sudah disepakati bersama (Pertiwi, 2019). Jenis risiko yang melekat pada perusahaan adalah risiko *inherent*, risiko inherent ini berasal dari lingkungan organisasi entitas tersebut, dalam penelitian ini adalah lingkungan organisasi BUMN yang hybrid. Lingkungan Organisasi seperti yang tercantum dalam Standar Audit 315 (Pengidentifikasian Dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungannya) memiliki 5 Komponen (IAPI).

Komponen Pertama adalah faktor-faktor industri, peraturan, dan eksternal lain yang relevan termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat dinilai dengan beberapa indikator salah satunya adalah koneksi politik yang dimana merupakan salah satu faktor eksternal politik (Maidina & Wati, 2020). Koneksi politik dapat memengaruhi biaya audit yang dibayarkan Perusahaan (Simanjuntak & Prabowo, 2021). Perusahaan yang memiliki koneksi politik berpotensi memiliki risiko inherent yang lebih tinggi, adanya koneksi politik dalam lingkungan organisasi yang *hybrid* dapat meningkatkan praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga berisiko mengalami kegagalan yang lebih besar dan akhirnya berdampak pada kenaikan biaya audit (Gul, 2006), dan tentunya memiliki dampak pada jumlah temuan pada laporan hasil pemeriksaan .

Kedua, Sifat entitas, termasuk: operasinya; struktur kepemilikan dan tata kelolanya dan sebagainya dapat dinilai dengan beberapa indikator salah satunya adalah Kompleksitas Perusahaan (Hay et al, 2008). Perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang banyak di dalam negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin kompleks karena perlu membuat

laporan konsolidasi (Beams. 2000). Pada beberapa penelitian juga menyatakan terdapat hubungan yang positif signifikan antara anak perusahaan dengan besar penetapan *Fee* audit eksternalnya (Hay et al , 2008). Selain itu, perusahaan yang lebih kompleks atau lingkungan organisasi yang *Hybrid*, atau jumlah anak perusahaan yang lebih besar, biasanya memiliki lebih banyak temuan, dan kompleksitas ini biasanya menyebabkan kemungkinan pencatatan yang tidak akurat yang lebih besar (Wulandari et al, 2019).

Ketiga, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, termasuk alasan perubahannya. Auditor harus mengevaluasi apakah kebijakan akuntansi entitas adalah tepat untuk bisnisnya dan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam industri yang relevan. Komite Audit merupakan salah satu jabatan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu kebijakan akuntansi (Larasati et al., 2019). Mereka juga harus membantu dewan komisaris memastikan pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan perusahaan memiliki kualitas yang baik dan meminimalisir jumlah temuan pada laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu diharapkan bahwa kualitas laporan keuangan pada laporan hasil pemeriksaanan meningkat dengan peran dan independensi komite audit, sehingga dapat mengurangi beban pekerjaan auditor eksternal dalam memeriksa kewajaran laporan keuangan (Larasati et al., 2019). Laporan keuangan yang baik dapat menghemat waktu dan tenaga auditor eksternal, dan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi masalah yang muncul selama proses pengauditan.

Keempat, tujuan dan strategi entitas, serta risiko bisnis terkait yang dapat memunculkan risiko kesalahan penyajian material. Risiko bisnis ini berkaitan erat dengan Risiko Litigasi, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Saragi, 2014). Menurut teori agensi, semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan maka perusahaan tersebut harus menyajikan informasi yang lengkap dan akurat untuk memenuhi kebutuhan investor dan mempertahankan kepercayaan investor. Hal inilah yang menyebabkan, auditor perlu bekerja lebih keras untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dan

Lita Natalia, 2024

mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan keabsahan laporan keuangan tersebut. Semakin berisiko perusahaan maka semakin tinggi biaya audit yang harus dikeluarkan (Suryanto et al, 2018 serta Mulyadi & Prasadhita, 2020). Selain itu risiko perusahaan memiliki implikasi yang positif berkenaan dengan biaya audit yang diterima auditor (Azizah et al, 2021).

Kelima Pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas, sebuah penelitian mencoba memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *Fee* audit dalam risiko keuangan dan menghasilkan suatu model yang menyatakan bahwa *Fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (Simunic, 1996). Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan Sari (2021). Semakin besar aktiva lancar semakin besar audit *Fee* yang dibayarkan perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan besar akan memiliki transaksi yang besar pula sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan audit lebih lama. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kontrol yang lebih baik, sehingga kemungkinan kualitas laporan keuangan lebih baik atau jumlah temuan pada laporan hasil pemeriksaan yang akan lebih rendah (Doyle et al, 2007).

Besarnya *fee* audit yang dibayarkan juga menggambarkan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP sangat baik, *Fee* Audit yang besar ini mayoritas dikeluarkan oleh perusahaan yang diaudit oleh Kantor akuntan publik terbesar di Indonesia yaitu KAP yang memiliki reputasi yang baik, klien yang banyak, dan pendapatan yang tinggi, KAP-kap ini biasanya merupakan mitra dari Big 4 KAP dunia, yaitu EY, Deloitte, PWC, dan KPMG. Selain Big 4, kap ini memberikan jasa akuntan dan audit yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Bisa Pajak, 2023). Oleh karena itu dengan *fee* audit yang besar diharapkan kualitas audit yang baik, dan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang baik dengan minimnya jumlah temuan.

Saat ini BUMN terus melakukan peningkatan kualitas pembinaan, pengawasan, dan regulasi dalam ranah pelaporan keuangan melalui pengawasan oleh penilai seperti akuntan publik dan badan pemeriksa keuangan republic Indonesia (BPK-RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, hal ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMN di masa depan (Wicaksono,

Lita Natalia, 2024

PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI HYBRID TERHADAP FEE AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Redaksi DDTC News, 2023). Akan tetapi berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, BPK mengungkapkan adanya temuan proyek di 13 BUMN senilai Rp 10,49 triliun yang belum diselesaikan. Proyek-proyek itu mendapatkan penyertaan modal negara (Uly et al, 2023). Selanjutnya dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP). Terdiri dari 681 LHP keuangan, 2 LHP kinerja, dan 22 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Beberapa BUMN tersebut di antaranya yakni PT PLN (Persero), PT Telkom (Persero) Tbk dan anak usahanya, PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, serta PT PGN Tbk. BUMN terus memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Menurut Menteri BUMN sendiri yaitu Erick Tohir, semua BUMN telah didorong untuk menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Uly et al, Kompas.com, 2023).

Tabel 1.1 Kluster Industri Perusahaan BUMN

No.	Perusahaan BUMN	Kluster Usaha	
		Industri	Jasa
1	Industri Energi Minyak dan Gas	2	
2	Industri Kesehatan	1	
3	Industri Manufaktur	2	
4	Industri Mineral dan Batubara	2	
5	Industri Pangan dan Pupuk	3	
6	Industri Perkebunan dan Kehutanan	2	
7	Jasa Asuransi dan Dana Pensiun		5
8	Jasa Infrastruktur		8
9	Jasa Keuangan		4
10	Jasa Logistik		6
11	Jasa Pariwisata dan Pendukung		2
12	Jasa Telekomunikasi dan Media		4
Total Perusahaan		12	29

Sumber : Website BUMN (2024)

Berdasarkan fakta dilapangan menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini terdiri 12 jenis kluster usaha yang berbeda-beda, Adapun kluster usahanya terbagi dua yaitu Industri dan Jasa. Pada kluster industri dimulai dengan industri kesehatan, manufaktur, mineral dan batubara, pangan dan pupuk, perkebunan dan hutan, jasa energi, minyak, dan gas. BUMN dengan kluster usaha

Lita Natalia, 2024

PENGARUH LINGKUNGAN ORGANISASI HYBRID TERHADAP FEE AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

juga terdiri dari jasa keuangan, jasa telekomunikasi dan media, jasa Infrastruktur, jasa logistic, jasa pariwisata, jasa asuransi dan dana pensiun (Kementerian BUMN, 2023). Sehingga perbedaan ukuran, kompleksitas, lingkungan dan organisasi yang *Hybrid* pada BUMN berbeda-beda dan akan mempengaruhi besaran *Fee* audit.

Penelitian sebelumnya belum melihat laporan hasil pemeriksaan perusahaan BUMN di Indonesia dengan indikator jumlah temuan BPK karena keanekaragaman karakter dan lingkungan entitas/ organisasi yang dimilikinya. Selain itu penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Lingkungan Organisasi Hybrid Terhadap *Fee* Audit Dan Implikasinya Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Koneksi Politik terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap *Fee* Audit pada perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Risiko Litigasi terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh *Fee* Audit terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh Koneksi Politik terhadap *Fee* Audit dan

Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia?

8. Bagaimana pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia?
9. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia?
10. Bagaimana pengaruh Risiko Litigasi terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia?
11. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Risiko Litigasi terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Fee* Audit terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh Koneksi Politik terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia
9. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia
10. Untuk menguji secara empiris pengaruh Risiko Litigasi terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia
11. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit dan Implikasinya terhadap terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada perusahaan BUMN di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapaun dengan adanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap wawasan akuntansi auditing, terutama mengenai *Fee* Audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebutkan penulis dalam penelitian ini yaitu Lingkungan Organisasi Hybrid (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia). Selain itu diharapkan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah khasanah penelitian untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan mempertimbangkan kebijakan yang akan digunakan perusahaan BUMN terkait keputusan dalam memutuskan *Fee* auditor selain itu penelitian ini dapat dijadikan untuk memprediksi besaran *Fee* Audit yang akan berikan oleh Kantor Akuntan Publik ditinjau melalui Lingkungan Organisasi Hybrid.
2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh Kantor Akuntan Publik dan audit, agar saat mendapatkan tugas audit dapat menentukan dan menerima *Fee* audit dengan professional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada perusahaan, auditor maupun perikatan.
3. Penelitian ini dapat juga menjadi pertimbangan mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang baik dengan berkualitasnya laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan.